



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Wali Kota kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian diperlukan suatu pengaturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Kewenangan adalah kekuasaan unsur yang melaksanakan fungsi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
5. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan di bidang kepegawaian yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Wali Kota kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada Wali Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelimpahan Kewenangan Mandat dan Delegasi penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI

Pasal 3

- (1) Wali Kota selaku pejabat pembina kepegawaian berwenang menandatangani Naskah Dinas Kepegawaian.
- (2) Wali Kota melimpahkan Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
 - a. Mandat; atau
 - b. Delegasi.
- (4) Rincian pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

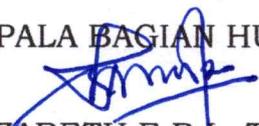
Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 25 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN MANDAT DAN DELEGASI
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI ATAS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN

NO.	MANAJEMEN BIDANG KEPEGAWAIAN	JENIS PELIMPAHAN KEWENANGAN	PENERIMA	BENTUK	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/JENJANG/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/Inpassing, atau Promosi	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda	
2	Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Mekanisme Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, Penyesuaian/Inpassing, atau Promosi	Mandat	Kepala BKPSDM	Keputusan	Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana Lanjutan/Mahir, Pelaksana/Terampil	

3	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda	
4	Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional	Mandat	Kepala BKPSDM	Keputusan	Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana Lanjutan/Mahir, Pelaksana/Terampil	
5	Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda	
6	Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional	Mandat	Kepala BKPSDM	Keputusan	Jenjang Penyelia, Pelaksana Lanjutan, Pelaksana Lanjutan/Mahir, Pelaksana/Terampil	
7	Keputusan Penyesuaian Tunjangan Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Jenjang Jabatan Fungsional	
8	Tugas Belajar	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	Sampai dengan Pendidikan Strata - 3/S-3
9	SK Peningkatan Pendidikan	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan		Jenjang Pendidikan Menengah (SMP sampai dengan D3)
10	Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Jenjang Jabatan Fungsional	

11	Penugasan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN)	Delegasi	Sekretaris Daerah	Surat Perintah		Peserta PIM II
12	Perpindahan Pejabat Fungsional antar Perangkat Daerah	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Jenjang Jabatan Fungsional	
13	Penyesuaian Jenjang Jabatan Fungsional Guru	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan	Semua Jenjang Jabatan Fungsional Guru	
14	Penempatan Kembali Pasca Tugas Belajar	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	
15	Penempatan Pegawai/Alih Status	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	
16	Pengambilan Sumpah/Janji Aparatur Sipil Negara dan Pembuatan Berita Acara	Mandat	Sekretaris Daerah	Berita Acara	Semua Pangkat/Golongan	
17	Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional, Khusus Mengenai Pembebasan Sementara dan Kenaikan Jabatan	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Jenjang Jabatan Fungsional	
18	Perjanjian Tugas Belajar (Meninggalkan/Tidak Meninggalkan Tugas dan Jabatan)	Mandat	Sekretaris Daerah	Perjanjian Tugas Belajar		
19	Penetapan Kelulusan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	

20	Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah (STLUP) / Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP)	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	
21	Pengumuman kelulusan ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah/ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan	Semua Pangkat/Golongan	
B. BIDANG PEMBINAAN						
1	Pengumuman tentang Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara dan Hasil Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara	Delegasi	Sekretaris Daerah	Surat Pengumuman	Semua Pangkat Golongan	
2	Penetapan Tewas karena kecelakaan kerja/penyakit akibat langsung dari pekerjaan dan/atau lingkungan kerja	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat Golongan	
3	Pengambilan Sumpah/Janji Sebagai Pegawai Negeri Sipil	Mandat	Sekretaris Daerah	Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji	Semua Pangkat Golongan	
4	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Janji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Mandat	Sekretaris Daerah/ Asisten yang membidangi Kepegawaian	Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji	Semua Pangkat Golongan	

5	Perjanjian Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Perpanjangan Perjanjian Kinerja	Mandat	Kepala BKPSDM	Surat Perjanjian Kerja atau Surat Perpanjangan Perjanjian Kerja	Semua Pangkat Golongan	
6	Penetapan Laporan peristiwa yang Mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil Tewas atau Cacat	Delegasi	Kepala Perangkat Daerah	Surat Pernyataan	Semua Pangkat Golongan	
7	Pernyataan Rencana Penempatan Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Guru dan Nakes	Delegasi	Kepala Perangkat Daerah	Surat Pernyataan	Semua Pangkat Golongan	
8	Pernyataan Rencana Penempatan Bagi Calon Aparatur Sipil Negara Teknis	Delegasi	Sekretaris Daerah	Surat Pernyataan	Semua Pangkat Golongan	

C. BIDANG MUTASI

1	Keputusan Perintah Pelaksana Harian (PLH)	Mandat	Sekretaris Daerah	Surat Perintah	Pimpinan Perangkat Daerah	
2	Penempatan Kembali Pasca Penugasan Khusus	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat Golongan	
3	Penempatan Pegawai/Alih Status/Mutasi	Mandat	Sekretaris Daerah	Keputusan	Semua Pangkat Golongan	

4	Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala BKPSDM	Surat Pemberitahuan	Pimpinan Perangkat Daerah	
5	Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Negeri Sipil	Delegasi	Kepala Perangkat Daerah	Surat Pemberitahuan	Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah Masing-masing	
6	Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Delegasi	Kepala Perangkat Daerah	Keputusan	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Perangkat Daerah Masing-masing	
7	Mutasi Masuk ke Pemerintah Kota Balikpapan	Delegasi	Kepala BKPSDM	Surat Pengantar dan Nota Usul		
8	Pengumuman Penerimaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil Masuk Ke Pemerintah Kota Balikpapan	Delegasi	Kepala BKPSDM	Surat Pengumuman		
9	Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan		
10	Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pelaksana	Delegasi	Kepala BKPSDM	Keputusan		
11	Keputusan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil	Mandat	Kepala BKPSDM	Keputusan	Semua Pangkat Golongan	

12	Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit Kurang Dari 14 (Empat Belas) Hari, Cuti Melahirkan, Cuti Besar, Cuti Sakit Hasil Pengujian Kesehatan Lebih Dari 14 (Empat Belas) Hari	Delegasi	Sekretaris Daerah	Surat Izin Cuti	Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selain Kepala Perangkat Daerah
13	Cuti Tahunan, Cuti Alasan Penting, Cuti Sakit Kurang Dari 14 (Empat Belas) Hari, Cuti Melahirkan	Delegasi	Kepala Perangkat Daerah	Surat Izin Cuti	Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perangkat Daerah Masing-Masing
14	Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Displin Tingkat Sedang/Berat	Delegasi	Kepala BKPSDM	Surat Pernyataan	Semua Pangkat Golongan
15	Pernyataan Tidak Dijatuhi Hukuman Pidana	Delegasi	Kepala BKPSDM	Surat Pernyataan	Semua Pangkat Golongan

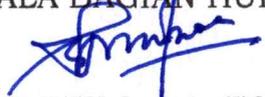
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN